

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN OKTOBER TAHUN 2023**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	17
1. Struktur Organisasi.	17
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	18
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	32
A. Kesimpulan.	32
B. Rekomendasi.	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	37
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA 005.01.	40
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA 005.05.	44
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	48

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Oktober 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Oktober 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNBP Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 28.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 29.	Data Promosi dan Mutasi Bulan Oktober pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 30.	Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 31.	Rekapitulasi kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Oktober secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

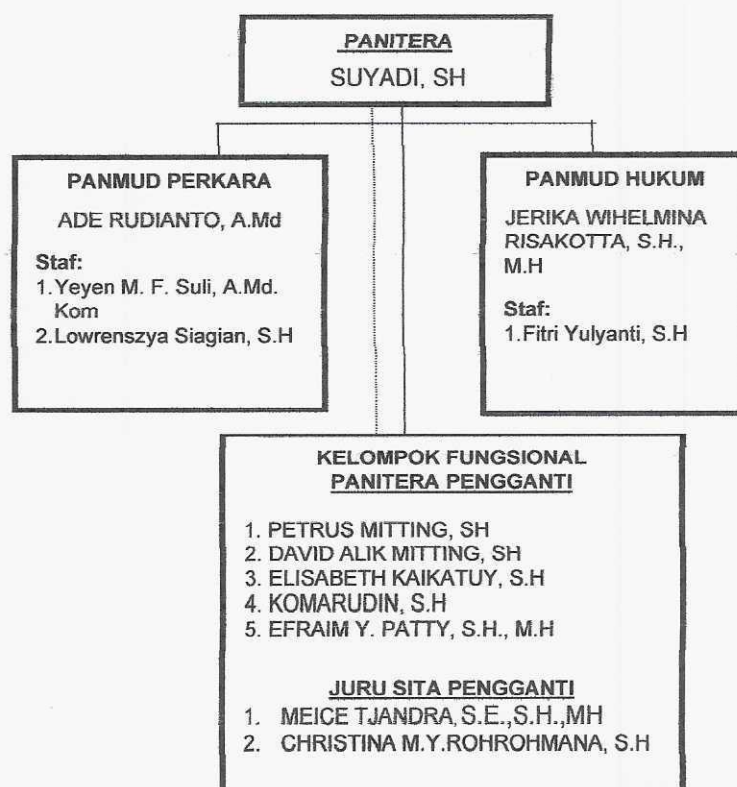
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Oktober 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN	MASUK	PUTUS	SISA	KETERANGAN			
		LALU	BLN INI	BLN INI	SD BLN INI	CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	13	2	2	13	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Oktober Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	5	1	6
2	Kepegawaian	3	-	3
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	1	-	1
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	4	1	5
Total		13	2	15

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Oktober 2023

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	33,390,500	-	-	33,390,500
2	Penerimaan	-	37,896,000	-	37,896,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	250,000	250,000
4	Biaya Panggilan	-	-	97,000	97,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	459,000	459,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	35,000,000	35,000,000
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	758,000	758,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	-	-
9	Materai	-	-	20,000	20,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	160,000	160,000
	b. Redaksi	-	-	20,000	20,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	540,000	540,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,227,000	1,227,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
13	Biaya Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	33,390,500	37,896,000	38,531,500	32,755,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Oktober 2023

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12,682,500			12,682,500
2	Penerimaan		300,000		300,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)			410,000	410,000
	Jumlah	12,682,500	300,000	410,000	12,572,500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Oktober 2023

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	2,176,000	-	-	2,176,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Materai	-	-	50,000	50,000
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
6	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	10,000	10,000
7	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
8	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
9	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	2,176,000	500,000	60,000	2,616,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.0.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Oktober Tahun 2023 adalah 75,51%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Oktober 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbarui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/110/HM.02.3/I/2023 tentang Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/109/HM.02.3/I/2023 tentang Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBYEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Thomas Pembwain, SH.,M.H	5/10/2023	Salinan Putusan Perkara Nomor 14/G/2023/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
2	Rafflesia Junita Girsang	5/10/2023	Salinan putusan Perkara Nomor 07/G/2023/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
3	Alvons Tebai, SH	16/10/2023	Salinan Putusan Perkara Nomor 05/2019/PTUN.JPR	Mendapat salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan Oktober 2023.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

**Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Oktober Tahun 2023
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Roselina Lopilalan	Konsultasi Hukum Terkait Masalah Tanah	1 Jam	-
2	Rosalina Enggelina Pulalo	Konsultasi Hukum Terkait Masalah Tanah	1 Jam	-
3	Hanna Oropa	Konsultasi Hukum Terkait Pengakatan Hak Asuh Anak	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

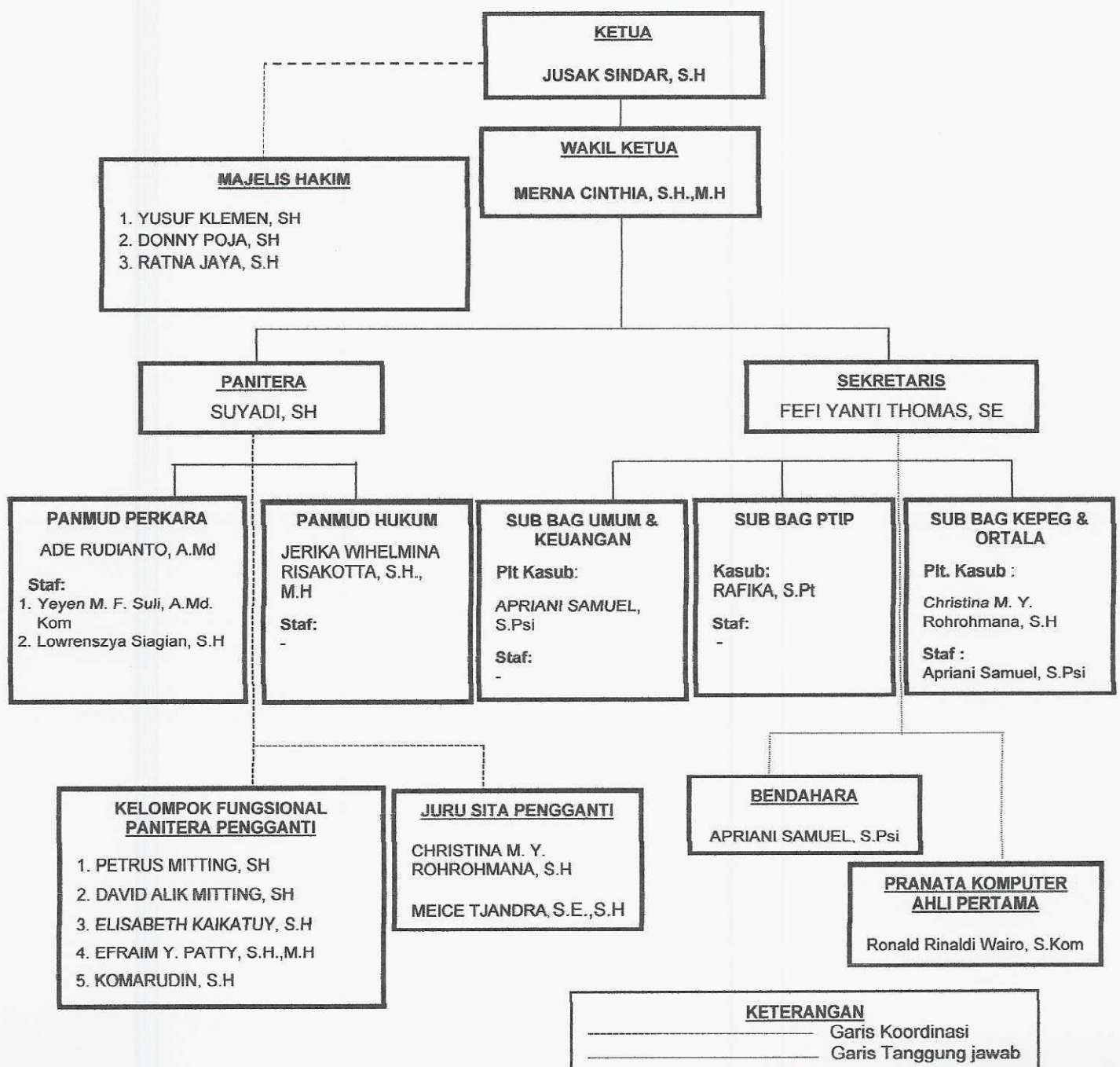
Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,861,241,000
Belanja Barang	1.940.510.000
Belanja Modal	1.088.433.000
Total	6.890.184.000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 sampai Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12.000.000
Pos Bantuan Hukum	32.900.000
Prodeo	1.400.000
Total	46.300.000

b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Oktober 2023

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3.861.241.000	258.489.595	3.043.079.312	818.161.688
2	Barang	1.937.214.000	109.126.803	1.629.537.828	307.676.172
3	Barang Non Operasional	3.296.000	0	2.980.000	316.000
4	Modal	1.088.433.000	100.759.000	139.192.000	949.241.000

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	46.300.000	2.400.000	33.656.700	12.643.300
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

1) Laporan PNBPN

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Oktober Tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.147.562	22.858.238
2	425232	Uang Meja (Leges)	180.000	1.310.000
3	425233	Ongkos Perkara	200.000	2.820.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	856.000	14.173.000
		Total	3.383.562	41.161.238

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 1444 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992	700 m2	150 m2
3	C	1992	1100 m2	120 m2
4	C	1992	1100 m2	120 m2
5	C	1992	1100 m2	120 m2
6	C	1992	1100 m2	120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	W8-TUN3/70/PL.01/II/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	W8-TUN3/839/PL.01/VIII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M2	W8-TUN3/720/PL.01/VII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	W8-TUN3/697/PL.01/VI/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	W8-TUN3/387/PL.06/II/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Vios	2006	PA 1988 DZ	Baik	W8-TUN3/504/PL.06/II/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	W8-TUN3/82/PL.06/II/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	

4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	W8-TUN3/ 88/PL.06/I/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Baik	W8-TUN3/ 86/PL.06/I/2023	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	W8-TUN3/ 905/PL.06/VI/2023	MEICE TJANDRA, S.H.,M.H	JURU SITA PENGGANTI	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Baik	W8-TUN3/ 1140/PL.06/XI/202 3	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Baik	W8-TUN3/ 100/PL.06/I/2023	DEDY W. NUGRAHA, A.Md	Pengelola BMN	PENGELOLA KEUANGAN
10	Honda	2008	DS 4301 DZ	Baik	W8-TUN3/ 92/PL.06/I/2023	MARTA DANGKUNG	KASUB.KEPG & ORTALA	
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Baik	W8-TUN3/ 98/PL.06/I/2023	RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	
12	Honda	2005	PA 4732 DZ	Baik	W8-TUN3/ 90/PL.06/I/2023	PETRUS MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	W8-TUN3/ 108/PL.06/I/2023	KOMARUDIN, SH	PANITERA PENGGANTI	
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Baik	W8-TUN3/ 104/PL.06/I/2023	ELIZABETH KAIKATUY, SH	PANITERA PENGGANTI	
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Baik	W8-TUN3/ 110/PL.06/I/2023	CHRISTINA.M.Y. ROHROHMANA, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	BENDAHARA PENERIMAAN
16	Honda	2007	PA 4518 DZ	Baik	W8-TUN3/ 94/PL.06/I/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Baik	W8-TUN3/ 102/PL.06/I/2023	EFRAIM Y. PATTY	PANITERA PENGGANTI	
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	W8-TUN3/ 96/PL.06/I/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	W8-TUN3/ 106/PL.06/I/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-	
3	Sedan	1	-	-	
4	Mini Bus	3	-	1	
5	Sepeda Motor	13	-	2	
6	Kursi Roda	1	-	-	
7	Cermin	2	-	3	
8	Rak-rak Penyimpan	14	1	3	
9	Lemari Besi	3	-	7	
10	Lemari Kayu	30	6	8	
11	Brankas	2	-	-	
12	CCTV	1	-	-	
13	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11	
14	White Board	1	-	1	
15	LCD Proyektor	1	-	-	
16	Alat Kantor Lainnya	1	-	3	
17	Meja Kerja Kayu	57	14	50	
18	Kursi Besi	29	4	44	
19	Kursi Kayu	20	31	41	
20	Sice	5	3	12	
21	Bangku Panjang Kayu	20	7	7	
22	Sketsel	2	-	-	
23	Kursi Fiber Glass	23	33	14	
24	AC Split	21	-	15	
25	Mixer	2	-	1	
26	Televisi	3	-	6	
27	Amplifire	2	1	-	
28	Loudspeaker	6	-	8	
29	Tiang Bendera	4	1	1	
30	Kaca Hias	1	-	1	
31	Palu Sidang	2	-	1	
32	Lambang Instansi	1	-	-	
33	Handycam	1	-	-	Dalam proses penghapusan
34	Audio Mixing Console	1	-	-	
35	Microphone/Wireless Mic	6	-	2	
36	UPS	7	-	-	
37	Microphone cable	11	-	-	
38	Camera Conference	1	-	-	
39	Genset	1	-	-	
40	Walker Polding	2	-	-	
41	Komputer jaringan lainnya	3	-	-	
42	PC	25	4	13	
43	Laptop	8			

44	Notebook	9	6	5	
45	Printer	6	6	16	
46	scanner	1	-	2	
47	server	1	-	1	
48	router	1	-	1	
49	Rak server	1	-	-	
50	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-	
51	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-	
52	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-	
53	Pagar permanen	1	-	-	
54	Referensi	18	-	-	
55	Papan pengumuman	-	1	-	
56	Meja komputer	-	1	3	
57	Meja Resepsionis	-	1	1	
58	Compact disk player	-	1	-	
59	Alat tenis meja	-	1	1	Dalam proses penghapusan
60	Lemari Penyimpan	-	-	3	Dalam proses penghapusan
61	Mesin ketik manual standar	-	-	3	Dalam proses penghapusan
62	Mesin Ketik manual Langewagon	-	-	2	Dalam proses penghapusan
63	Rak kayu	-	-	1	Dalam proses penghapusan
64	Filling Cabinet besi	-	-	12	Dalam proses penghapusan
65	Tempat tidur besi	-	-	1	Dalam proses penghapusan
66	Tempat tidur kayu	-	-	3	Dalam proses penghapusan
67	Meja telepon	-	-	1	Dalam proses penghapusan
68	Kasur/spring bed	-	-	7	Dalam proses penghapusan
69	Meja makan kayu	-	-	1	Dalam proses penghapusan
70	Perkakas kantor lainnya			1	Dalam proses penghapusan
71	Pot bunga	-	-	6	Dalam proses penghapusan
72	Jam elektronik	-	-	10	Dalam proses penghapusan
73	Lemari es	-	-	2	Dalam proses penghapusan
74	Kipas angin	-	-	18	Dalam proses penghapusan
75	Equalizer	-	-	1	Dalam proses penghapusan
76	Sound System	-	-	1	Dalam proses penghapusan
77	Microphone	-	-	2	Dalam proses penghapusan
78	Microphone table stand	-	-	6	Dalam proses penghapusan
79	Stabilisator	-	-	3	Dalam proses

					penghapusan
80	Lambang Garuda Indonesia	-	-	3	Dalam proses penghapusan
81	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	-	1	Dalam proses penghapusan
82	Pataka	-	-	5	Dalam proses penghapusan
83	Dispenser	-	-	5	Dalam proses penghapusan
84	Mimbar/Podium	-	-	2	Dalam proses penghapusan
85	Gordyn/kray	-	-	9	Dalam proses penghapusan
86	Kabel roll	-	-	9	Dalam proses penghapusan
87	Asbak tinggi	-	-	3	Dalam proses penghapusan
88	Keset kaki	-	-	6	Dalam proses penghapusan
89	Kabel	-	-	2	Dalam proses penghapusan
90	Camera digital	-	-	1	Dalam proses penghapusan
91	Key telephone	-	-	5	Dalam proses penghapusan
92	Pesawat telephone	-	-	12	Dalam proses penghapusan
93	Telephone mobile	-	-	2	Dalam proses penghapusan
94	Faximili	-	-	3	Dalam proses penghapusan
95	Antenna SHF Transportable	-	-	2	Dalam proses penghapusan
96	Peralatan antenna SHF	-	-	2	Dalam proses penghapusan
97	All band receiver	-	-	1	Dalam proses penghapusan
98	Alat pemadam kebakaran	-	-	1	Dalam proses penghapusan
99	Generator	-	-	2	Dalam proses penghapusan
100	Stabilizer	-	-	4	Dalam proses penghapusan
101	Internet	-	-	1	Dalam proses penghapusan
102	Hard disk	-	-	3	Dalam proses penghapusan
103	Rambu papan tambahan	-	-	1	Dalam proses penghapusan
104	Monografi	-	-	2	Dalam proses penghapusan
105	Software computer	-	-	1	Dalam proses penghapusan

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 1 Tahun 2017 tentang penetapan status BMN serta berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W4-TUN4/928/um.03.10/1x/2017 tanggal 04 Februari 2017 SK penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum ada.

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Pengalihan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diusulkan untuk penghapusan BMN yang statusnya dalam keadaan rusak berat. Sedangkan BMN yang hilang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diselesaikan tuntutan ganti rugi (TGR).

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	5	27
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	25	16
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	-	1
4	Kepaniteraan Perkara.	14	31
5	Kepaniteraan Hukum.	3	2

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Oktober 2023 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik belum

dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**, Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

- 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan
Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.
- 3) Pengelolaan Aset dan BMN

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 25 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
6.	Panitera	Suyadi, S.H	
7.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
8.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
9.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
10.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
13.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
14.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
15.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
16.	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	
17.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
18.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
19.	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
20.	Jurusita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	Pit. Kasub Kepegawaian & Ortala

21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
22.	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	
23.	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	
24.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
5	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
6	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
7	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
8	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
9	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
13	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
14	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
15	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
16	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., S.H	III/c
17	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
18	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
19	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
21	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	III/a
22	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
23	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
24	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I dan Plt. Kepegawaian dan Ortala
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator SAIBA
5	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Pembuat Daftar Gaji BMN
6	Rafika, S.Pt	Kepala Sub Bagian PTIP	Pejabat Penandatangan SPM

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Oktober mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

Tabel 29. Data Promosi dan Mutasi Bulan Oktober Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	PROMOSI/MUTASI		TMT
		JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1.	Apriani Samuel, S.Psi	Analisis SDM Aparatur PTUN Jayapura	Kasub Umum dan Keuangan PTUN Jayapura	-

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Oktober ini pensiun.

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Oktober mengikuti Diklat maupun Bimtek.

Tabel 30. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PELAKSANA
1	Jusak Sindar, S.H	Ketua	Bimtek ASN Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN di Wilayah Hukum PTTUN Manado	PTTUN Manado
2	Ronald R. Wairo, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	PJJ PPK	Pusdiklat Anggaran Dan Pembendaharaan pusat
			Bimtek ASN Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN di Wilayah Hukum PTTUN Manado	PTTUN Manado
3	Yusuf Klemen, SH	HAKIM	Bimtek Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan TUN	Dir. Pembinaan Tenaga Teknis Dan Adminitrasi Peradilan TUN
			Bimtek ASN Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN di Wilayah Hukum PTTUN Manado	PTTUN Manado

4	Suyadi, S.H	PANITERA	Bimtek ASN Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN di Wilayah Hukum PTTUN Manado	PTTUN Manado
5	Rafika, S.Pt	Kasub PTIP	PJJ PPSPM	BDK Manado
6	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	PJJ PPSPM	BDK Manado

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fefi Yanti Thomas. SE sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fefi Yanti Thomas, S.E sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
6	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
7	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
8	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
9	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
10	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
11	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
12	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
13	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
14	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
15	Komarudin, SH	Lengkap	-
16	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	Lengkap	-
17	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
18	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-

19	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
20	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
21	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
22	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-
23	Lowrenszya Siagian, S.H	Lengkap	-
24	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Oktober Tahun 2023 dilakukan revisi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 tingkat DJA Eselon 1.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung SK MA 1-144 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari SK 144/2007 mengenai dasar pembuatan situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP sesuai SK Nomor W4-TUN4/55/OT.01.3/1/2023 Pelaksana redaktur dan editor adalah Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

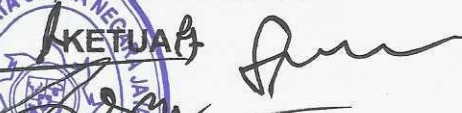
B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Umum Keuangan dan bagian Kepegawaian Ortala.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 16 November 2023



JUSAK SINDAR

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN OKTOBER 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
 NO. DIPAU TGL DIPAU : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
 NO. DIPAU TGL DIPAU : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-1 TANGGAL 14 APRIL 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-3
 NO. DIPAU TGL DIPAU REVISI : TANGGAL 01 SEPTEMBER 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-4 TANGGAL 23 OKTOBER 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
				5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	4									
1066		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
1066.EBA		LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
1066.EBA.962		Layanan Umum										
051		Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
A. 521252		Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	2.296.000	1.980.000	86.24%	0	0.00%	1.980.000	86.24%	316.000	13.76%	
051		Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
B. 521252		Alat bantu jalan	1.000.000	1.000.000	100.00%	0	0.00%	1.000.000	100.00%	0	0.00%	
			3.296.000	2.980.000	90.41%	0	0.00%	2.980.000	90.41%	316.000	9.59%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003										
1066.EBA.994		LAYANAN PERKANTORAN										
001		Gaji dan Tunjangan										
A. 511111		Belanja Gaji Pokok PNS	1.246.455.000	939.052.440	75.34%	86.347.100	6.93%	1.025.399.540	82.27%	221.055.460	17.73%	
511119		Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	16.053	69.80%	1.525	6.63%	17.578	76.43%	5.422	23.57%	
511121		Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	99.032.000	66.863.260	67.52%	6.184.580	6.25%	73.047.840	73.76%	25.984.160	26.24%	
511122		Belanja Tunj. Anak PNS	30.375.000	21.492.492	70.78%	2.056.764	6.77%	23.549.256	77.53%	6.825.744	22.47%	
511123		Belanja Tunj. Struktural PNS	32.760.000	23.580.000	71.98%	1.800.000	5.49%	25.380.000	77.47%	7.380.000	22.53%	
511124		Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.485.850.000	1.092.835.000	73.55%	96.810.050	6.50%	1.189.445.050	80.05%	296.404.950	19.95%	
511125		Belanja Tunj. PPh PNS	258.378.000	181.653.012	70.31%	14.234.858	5.51%	195.887.868	75.81%	62.490.132	24.19%	
511126		Belanja Tunj. Beras PNS	73.579.000	51.635.460	70.18%	4.779.720	6.50%	56.415.180	76.67%	17.163.820	23.33%	
511129		Belanja Uang Makan PNS	228.664.000	128.292.000	56.11%	16.600.000	7.26%	144.892.000	63.36%	83.772.000	36.64%	
511138		Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	209.970.000	146.275.000	69.66%	16.770.000	7.99%	163.045.000	77.65%	46.925.000	22.35%	
511181		Belanja Tunjangan Umum PNS	19.385.000	12.885.000	66.62%	1.105.000	5.71%	14.000.000	72.33%	5.385.000	27.67%	
511187		Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	176.800.000	120.000.000	67.87%	12.000.000	6.79%	132.000.000	74.66%	44.800.000	25.34%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	3.861.241.000	2.784.589.717	72.12%	258.489.595	6.69%	3.043.079.312	78.81%	818.161.688	21.19%	
002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
A. 521111		Belanja Keperluan Perkantoran	589.641.000	443.674.806	75.24%	47.519.264	8.06%	491.194.070	83.30%	98.446.930	16.70%	
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73.147.000	69.092.872	94.46%	790.500	1.08%	69.883.372	95.54%	3.263.628	4.46%	
B. 521111		Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	236.044.000	187.961.210	71.16%	18.402.700	7.80%	186.363.910	78.95%	49.680.090	21.05%	
521114		Belanja Pengiriman Surat/Dinas Pos Pusat	25.800.000	10.999.640	42.63%	3.436.800	13.32%	14.436.440	55.96%	11.363.560	44.04%	

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(8/4)	10=(9/4)	11=(10/4)	12=(11/4)	13
	522112	Belanja Langgananan Telepon	5,520,000	3,359,533	60.86%	334,089	6.05%	3,693,622	66.91%	1,826,378	33.09%	
	522113	Belanja Langgananan Air	2,100,000	516,000	24.57%	56,000	2.67%	572,000	27.24%	1,528,000	72.76%	
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	5,500,000	5,016,173	91.20%		0.00%	5,016,173	91.20%	483,827	8.80%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	523,635,000	498,635,000	95.23%		0.00%	498,635,000	95.23%	24,999,000	4.77%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,020,000	55,960,257	99.89%		0.00%	55,960,257	99.89%	59,743	0.11%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195,971,000	130,421,570	66.55%	20,200,450	10.31%	150,622,020	76.88%	45,348,980	23.14%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakal dan Dinas)	34,152,000	34,000,000	99.55%		0.00%	34,000,000	99.55%	152,000	0.45%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,804,000	40,302,000	50.00%	18,387,000	22.81%	58,689,000	72.81%	21,915,000	27.19%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,080,000	60,471,164	55.44%		0.00%	60,471,164	55.44%	48,608,836	44.56%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.002	1,937,214,000	1,520,411,025	78.49%	109,128,803	5.63%	1,629,537,828	84.12%	307,676,172	15.88%	
	1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG										
	1071.EBB.981	LAYANAN SARANA INTERNAL										
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran										
	A. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Kursi Roda)	4,000,000	4,000,000	100.00%		0.00%	4,000,000	100.00%	0	0.00%	
	B. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Meubelair)	50,000,000	0	0.00%		0.00%	0	0.00%	50,000,000	100.00%	
	1071.EBB.971	LAYANAN PRASARANA INTERNAL										
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan										
	A. 533121	Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/Toilet Disabilitas)	34,433,000	34,433,000	100.00%		0.00%	34,433,000	100.00%	0	0.00%	
	B. 533111	Pagar Kantor	1,000,000,000	0	0.00%	100,759,000	10.08%	100,759,000	10.08%	899,241,000	89.92%	
		JUMLAH KEGIATAN 1071.EAD.001	1,088,433,000	38,433,000	3.53%	100,759,000	9.28%	139,192,000	12.79%	949,241,000	87.21%	
		JUMLAH KESELURUHAN	6,890,184,000	4,346,413,742	63.08%	468,375,398	6.80%	4,814,789,140	69.88%	2,075,394,860	30.12%	

Jumlah Anggaran	6,890,184,000	Percentase
Realisasi Anggaran	4,814,789,140	69.88%
Sisa Anggaran	2,075,394,860	30.12%



LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPOSISI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN T
NO. DIPAJ/ TGL DIPAJ : SP DIPAJ- 005.05.2.539139/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 1
NO. DIPAJ/ TGL DIPAJ : SP DIPAJ- 005.01.2.539139/2023 REVISI KE-1 TANGGAL 14

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.03.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelamatan Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	12,000,000	9,320,000	77.67%		0.00%	9,320,000	77.67%	2,680,000	22.33%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	12,000,000	9,320,000	77.67%	0	0.00%	9,320,000	77.67%	2,680,000	22.33%	
II	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK Posbakum)	4,100,000	2,736,700	66.75%	0	0.00%	2,736,700	66.75%	1,363,300	33.25%	
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultan Hukum	28,800,000	19,200,000	66.67%	2,400,000	8.33%	21,600,000	75.00%	7,200,000	25.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	32,900,000	21,936,700	66.68%	2,400,000	7.29%	24,336,700	73.97%	8,563,300	26.03%	

NO	KODE	JENIS BELANJUAN/NAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL 5	% 6=(5/4)	TOTAL 7	% 8=(7/4)	TOTAL 9=(5+7)	% 10=(9/4)	TOTAL 11=(4+9)	% 12=(11/4)	
1	2	3	4									13
III	1059.QCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521211	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	521811	Alat Tulis Kantor	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	100.00%	
	522151	Honorarium Untuk Ahli Penjemah/Juru Bahasa untuk Perkara Tertentu	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	524113	Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	500,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.002	1,400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,400,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	46,300,000	31,256,700	67.51%	2,400,000	5.18%	33,656,700	72.69%	12,643,300	27.31%	

Jumlah Anggaran	46,300,000	Percentase
Realisasi Anggaran	33,656,700	72.69%
Sisa Anggaran	12,643,300	27.31%

Jayapura, 06 November 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Pengaditan Tata Usaha Negara Jayapura



FERYANTY THOMAS, SE
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Oktober 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (25.51) PAPUA / KOTA JAYAPURA
 Satuan Kerja : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.01.2.539138/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (063) Jayapura
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 ^(*)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 ^(*)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 ^(*)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	2.147.562,00
		(-)
3. Selisih	Rp	- 2.147.562,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) : Selisih sebesar Rp. 2.147.562,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNBP sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.147.562,-.
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar Rp. 2.147.562,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNBP sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.147.562,-.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



FEFLYANT THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

KOTA JAYAPURA , 31 Oktober 2023

Bendahara Penerimaan



CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

Hasil Pemeriksaan Kas **Periode Oktober 2023**

Kadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	2.147.562
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 2.147.562

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Selisih sebesar Rp. 2.147.562,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNB

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih sebesar Rp. 2.147.562,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNB

Bendahara Penerimaan



CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA SH
NIP 198508172019032006



LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Oktober 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA
 : NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (25.51) PAPUA / KOTA JAYAPURA
 Satuan Kerja : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.05.2.539139/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (063) Jayapura
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00058/SSBP/539139/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 ^(*)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 ^(*)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	1.236.000,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.236.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.236.000,00 ^(*)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	1.236.000,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	2.295.000,00
3. Selisih	Rp	- 1.059.000,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) : Selisih sebesar Rp.1. 059.000 merupakan setoran bulan Juli yang baru direkam di bulan Oktober pada saat perekaman, memilih tanggal jurnal dengan Periode yang masih terbuka (oktober) sehingga tercatat oleh UAKPA
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar Rp.1. 059.000 merupakan setoran bulan Juli yang baru direkam di bulan Oktober pada saat perekaman, memilih tanggal jurnal dengan Periode yang masih terbuka (oktober) sehingga tercatat oleh UAKPA



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

PEFI YANTI THOMAS, SE
NIP 197903102006042002

KOTA JAYAPURA , 31 Oktober 2023

Bendahara Penerimaan

CHRISTINA M Y ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Oktober 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00058/SSBP/539139/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	1.236.000
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	1.236.000
B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	2.295.000
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 1.059.000

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Selisih sebesar Rp.1. 059.000 merupakan setoran bulan Juli yang baru direkam di bulan Oktober pada saat perekaman, memilih tanggal jurnal dengan Periode yang masih terbuka (oktober) sehingga tercatat oleh UAKPA

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih sebesar Rp.1. 059.000 merupakan setoran bulan Juli yang baru direkam di bulan Oktober pada saat perekaman, memilih tanggal jurnal dengan Periode yang masih terbuka (oktober) sehingga tercatat oleh UAKPA

Bendahara Penerimaan

CHRISTINA M Y ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006



Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

PEFI YANTI THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)

FORMULARIJ - T1

Mengetahui:

USHA KETUA,
Pengadilan Pajak Usaha Negara Jayapura

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1

JUSAK SINDAR

STY-ADI

Jayapura, 31 Oktober 2023

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN OKTOBER TAHUN 2023

Formulir LJ - T2

NO	JENIS PERKARA	PERKARA				PENGGUGAT		TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						Permohonan			Terima Berkas			KET.			
		SISA BULAN LALU	MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH	DISMISSAL	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH	SISA PERKARA BULAN INI	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	BANDING		KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																		5	1				3			
1	Pertanahan	5	1	-	6	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepegawaian	3		-	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perjinaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pergantian Antar Waktu (PAW)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KIP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tindakan Faktual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Merek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lain - Lain	4	1	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	13	2	-	15	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	13	2	-	-	-	3	-	-	-

Jayapura, 31 Oktober 2023

Mengetahui :

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

[Signature]
SWADI

Formulir LI - T3

SUYADI

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN OKTOBER 2023

Formulir LI - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	02-10-2023	Roselina Lopulalan	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE, YULIYANTO, SH.,MH. 0811488998, Jl. Jeruk Nipis Depan RS-POLRI Bhayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Masalah Tanah	
2	-	23-10-2023	Rosalina Enggelina Pulalo		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait masalah Tanah	
3	-	24-10-2023	Hanna Oropa		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Pengangkatan Hak Asuh Anak	

Jayapura, 31 Oktober 2023

Mengetahui:



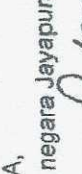
PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUNADI

Formulir L1-T5

Jayapura, 31 Oktober 2023

K E T U A,
Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura



JUSAK SINDAR

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI

**LAPORAN PELAKSANAAN PENYANDAN DISABILITAS
BULAN OKTOBER TAHUN 2023**

Formulir LI - T6

[illegible]

Mengetahui :

Jayapura, 31 Oktober 2023

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI

**LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN OKTOBER TAHUN 2023**

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T7

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	33,390,500	-	-	33,390,500
2	Penerimaan	-	37,896,000	-	37,896,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	250,000	250,000
4	Biaya Panggilan	-	-	97,000	97,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	459,000	459,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	35,000,000	35,000,000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	758,000	758,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	-	-
9	Materai	-	-	20,000	20,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	160,000	160,000
	b. Redaksi	-	-	20,000	20,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	540,500	540,500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,227,000	1,227,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
13	Biaya Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	33,390,500	37,896,000	38,531,500	32,755,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12,682,500	-	-	12,682,500
2	Penerimaan	-	300,000	-	300,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	410,000	410,000
	Jumlah	12,682,500	300,000	410,000	12,572,500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	2,176,000	-	-	2,176,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	50,000	50,000
3	Materai	-	-	-	-
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
6	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	10,000	10,000
7	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
8	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
9	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	2,176,000	500,000	60,000	2,616,000

Jayapura, 31 Oktober 2023

MENGETAHUI :

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



JUSWINDAR

KPANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

[Signature]
SUYADI